

Faktor Penyebab Sulitnya Malaysia Lepas Dari Status Middle-Income Country

Kirana Wira Satya Dharma

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: kiranawr@gmail.com

Abstract

Malaysia is a country in Southeast Asia with economic power in the world is taken into account. Although regarded as an economic power superior, Malaysia is still classified as a country of upper middle-income, with a GNI per capita of 10 570 USD in 2015, lags behind neighboring Singapore, which has become the high-income with GNI per capita of 52 090 American dollars. Malaysia stagnant economic growth and according to the indicator by the World Bank, has got stuck in the middle-income trap. This study seeks to provide an explanation of the factors that make it difficult for Malaysia to escape the middle-income country status. The author proposes the hypothesis that the presence of Bumiputera in Malaysia policy encouraging the growth of a culture of cronyism in Malaysia's political and economic implications are then limiting factors of economic growth in Malaysia. Malaysian Bumiputera policy embodied in rights - privileges to ethnic Malays over non-Malay ethnic prone then lead to the practice of rent-seeking which is the beginning of cronyism.

Keywords: Malaysia, middle-income trap, Bumiputera, rent-seeking, cronyism

Abstrak

Malaysia, merupakan negara di Asia Tenggara dengan kekuatan ekonomi yang cukup diperhitungkan di dunia. Meskipun dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang unggul, Malaysia sampai saat ini masih diklasifikasikan sebagai negara upper middle-income, dengan GNI per kapita 10.570 dolar Amerika pada tahun 2015, tertinggal dari negara tetangganya Singapura yang telah menjadi negara high-income dengan GNI per kapita sebesar 52.090 dolar Amerika. Malaysia mengalami stagnansi pertumbuhan ekonomi dan menurut indikator oleh World Bank, telah terjebak dalam kondisi middle-income trap. Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyulitkan Malaysia untuk melepaskan diri dari status middle-income country. Penulis mengajukan hipotesis bahwa adanya Kebijakan Bumiputera di Malaysia mendorong tumbuhnya budaya kronisme dalam politik dan ekonomi Malaysia yang implikasinya kemudian membatasi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kebijakan Bumiputera Malaysia yang terwujud dalam hak – hak istimewa terhadap etnis Melayu di atas etnis non-Melayu ini rawan kemudian mengarah pada praktik rent-seeking yang merupakan awal dari kronisme.

Kata Kunci: Malaysia, middle-income trap, Kebijakan Bumiputera, rent-seeking, kronisme

Studi oleh World Bank pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 101 negara yang mencapai posisi middle-income yang pada dekade 1960, hanya 13 di antaranya yang berhasil mencapai posisi high-income. Malaysia sampai saat ini

masih diklasifikasikan sebagai negara upper middle-income, dengan GNI per kapita 10.570 dolar Amerika pada tahun 2015, dan harus puas dengan menjadi negara terkaya ketiga di ASEAN setelah Singapura dan Brunei Darussalam.

Namun meskipun oleh Commission on Growth and Development Malaysia telah diidentifikasi sebagai salah satu dari hanya 13 negara yang memiliki angka pertumbuhan rata-rata lebih dari 7% tiap tahunnya dalam kurun waktu 25 tahun, pada akhirnya Malaysia harus mengalami nasib serupa dengan banyak negara berkembang lainnya, angka pertumbuhan Malaysia menurun dan mengantarkan pada kekhawatiran akan middle-income trap, yang dicirikan dengan hilangnya momentum laju pertumbuhan yang selama ini dialaminya (Schuman 2016). Terjebaknya suatu negara dalam middle-income trap menurut Felipe et. al. (2012) ditunjukkan dengan ketidakmampuan negara untuk lepas dari status middle-income country dalam kurun waktu maksimal yang diperkirakan, yaitu 28 tahun untuk lower middle-income menuju upper middle-income dan 14 tahun untuk upper middle-income menuju high income. Malaysia dikatakan terjebak dalam middle-income trap sejak tahun 2010 yaitu ketika ia menginjak tahun ke-15 sebagai negara upper middle-income country.

Istilah middle-income trap pertama kali digunakan oleh Indermit Gill dan Homi Kharas pada tahun 2007 dalam *An Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth* untuk menggambarkan kondisi stagnansi ekonomi akibat krisis 1997 yang pada akhirnya berhasil dilalui oleh negara-negara Asia Timur namun tidak kemudian oleh negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah. Kondisi middle-income trap dapat dialami oleh negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah dengan Gross National Income (GNI) per kapita di antara 1.045 dolar Amerika sampai 12.736 dolar Amerika, yang dapat dipisahkan lagi ke dalam lower-middle income dan upper-middle income dengan batas tengah 4.125 dolar Amerika (The World Bank 2016). Negara-negara berpendapatan menengah dapat terjebak dalam middle-income trap jika rata-rata pertumbuhan ekonominya berada di bawah 4,7% per tahun untuk negara dalam lower-middle

income, dan di bawah 3,5% per tahun untuk negara upper-middle income (Felipe et. Al. 2012). Meskipun tidak ada kesepakatan resmi namun secara umum istilah middle-income trap menggambarkan kondisi ketika pada level tertentu negara berpendapatan menengah mulai menjadi tidak kompetitif pada sektor industri bernilai tambah (value added industries), seperti manufaktur. Industri padat karya akan mulai didominasi oleh negara berupah rendah (low-wage country), di sisi lain persaingan dengan negara-negara berteknologi tinggi (high-technology country) juga masih terlalu sulit untuk dimenangkan, sehingga pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan cenderung stagnan atau bahkan menurun (Paus 2011).

Cherif dan Hasanov (2015) menjelaskan bahwa faktor kemunduran produktivitas yang mengancam negara terjebak dalam middle-income trap disebabkan oleh berkurangnya keuntungan yang sebelumnya didapatkan dari sektor tenaga kerja murah dan imitasi teknologi. Seiring meningkatnya status negara sebagai middle-income country, perubahan strategi ekonomi menjadi dibutuhkan, karena kompetisi tenaga kerja murah dan manufaktur ringan menjadi sulit dimenangkan ketika memiliki upah tenaga kerja yang tinggi. Sehingga kemudian inovasi dalam ide, metode, proses dan teknologi produksi merupakan kewajiban yang tak terelakkan (Aghion & Howitt 1992, dalam Cherif & Hasanov 2015).

Korea Selatan dan Taiwan merupakan dua contoh Negara yang mampu menghindari fenomena middle-income trap. Faktor-faktor yang dapat diukur seperti kinerja industrialisasi, kebijakan makroekonomi yang efektif dan tepat sasaran, kebangkitan inovasi manufaktur produk-produk highly-sophisticated, telah diyakini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kedua Negara. Namun di balik faktor-faktor tersebut terdapat pra-kondisi yang membedakan keduanya dengan Negara-negara berpenghasilan menengah, khususnya

yang terjebak dalam middle-income trap –Asia Tenggara dan Amerika Latin-, yang memungkinkan terlaksananya berbagai kebijakan berorientasi pertumbuhan dalam kedua Negara tersebut.

Pertama, pemerintah dari Korea Selatan dan Taiwan tidak harus bersaing dengan kelompok kepentingan yang memiliki kekuasaan besar. Kelompok-kelompok tersebut telah dihapuskan oleh masa pendudukan Jepang (bagi Korea), settlement oleh Cina daratan (bagi Taiwan), dan land reform (bagi keduanya). Karena itu, pembentukan dan implementasi kebijakan dapat terhindarkan dari politik pressure group. Kedua, ketiadaan akan ketimpangan dalam skala besar memberikan makna bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban yang mendesak untuk melakukan kebijakan redistribusi. Literatur analisis mengenai ekonomi politik pertumbuhan menunjukkan bahwa rezim yang mewarisi ketimpangan besar akan secara konstan berada di bawah tekanan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan growth-retarding atau yang berkontradiksi dengan pertumbuhan. Ketiga, dan masih berkaitan dengan faktor di atas, fakta bahwa pemimpin politik dapat dengan leluasa fokus pada tujuan-tujuan ekonomi, memiliki arti bahwa mereka dapat melakukan pengawasan terhadap birokrasi secara lebih dekat dan cermat. Hal ini penting, karena rezim yang bersifat intervensionis rawan untuk terjebak dalam dua masalah fatal dalam birokrasinya.

Poin signifikan terakhir yang membedakan antara Negara-negara Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Taiwan, dengan Negara-negara Asia Tenggara ialah adanya warisan kolonisasi yang berbeda. Bagi Negara-

negara Asia Tenggara, masa kolonial memberikan pengalaman ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara daerah urban dan pedesaan, antar wilayah dan antar kelompok etnis, yang bertahan hingga era paska-kemerdekaan. Kebanyakan dari Negara-negara ini memulai proses aselerasi pertumbuhannya pada dekade 1960 dengan bekal perbedaan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan dan Taiwan (Booth 1999).

Middle income trap, pada mayoritas kasusnya, disebabkan adanya growth slowdown yang lebih dipengaruhi oleh faktor productivity slowdown daripada faktor decreasing return dari akumulasi kapital. Pengaruh productivity slowdown – atau total factor productivity – terhadap growth slowdown mencapai 85 persen, sementara akumulasi kapital hanya menyumbang 15 persen (Eichengreen, et.al 2012). Dengan demikian, dari temuan di atas, diketahui bahwa human capital¹, perubahan struktural, dan inovasi adalah faktor krusial yang mendorong pertumbuhan total factor productivity (TFP), dan karenanya, sekaligus menjadi solusi atas permasalahan middle income trap (Vivarelli 2014).

Implementasi dari klaim di atas dapat ditemukan dalam analisis untuk IMF oleh Reda Cherif dan Fuad Hasanov (2015), *The Leap of the Tiger: How Malaysia Can Escape the Middle-Income Trap*, yang membandingkan pertumbuhan TFP di beberapa negara yang mampu menghindari middle-income trap, seperti Taiwan dan Korea Selatan, serta yang masih terjebak di dalamnya, seperti Malaysia dan Thailand. Taiwan dan Korea Selatan mengalami pertumbuhan TFP rata-rata pertahunnya 1,8% dalam jangkauan tahun 1970 sampai 2010, sedangkan

¹ pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh

orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. (Russel W. Coff, 1997. "Human Assets and Management Dilemmas: Coping with Hazards on the Road to Resource-Based Theory". *The Academy of Management Review* Vol. 22, No. 2 Apr., 1997.)

Malaysia hanya 0,8% dan Thailand 1,2%, padahal dari keempat negara tersebut Malaysia memulai pertumbuhan dengan paling baik dan memiliki angka TFP tertinggi pada awal dekade 1970. Hal tersebut membuktikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan dan Cina terbukti berhasil mendorong produktivitas dan pertumbuhan, yang kemudian memampukan keduanya mengejar GDP serta TFP dari Malaysia pada pertengahan dekade 1980.

Di samping pandangan mainstream mengenai middle-income trap yang berfokus pada aspek-aspek ekonomi, terdapat pula pandangan alternatif yang melihat fenomena middle-income trap dari aspek non-ekonomi. Pandangan ini meyakini bahwa kesepakatan sosial dan politik juga esensial dalam upaya menghindari kondisi stagnansi. Kapasitas dan kompetensi dari pemimpin politik dalam membangun konsensus selama implementasi manajemen krisis dan reformasi struktural sangat vital pada tahapan post crisis. Karena tak dapat disangkal bahwa krisis merupakan siklus dalam ekonomi – sering disebut sebagai konjungtur. Sehingga, aspek stabilitas sosial – politik menjadi perlu dalam proses pemulihan, dan sekaligus pembangunan ekonomi (Foley, et.al. 2011). Hal ini menjelaskan salah satu alasan mengapa negara-negara kawasan Afrika Sub Sahara mengalami kesulitan dalam membangun ekonominya, bahkan terus dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah dari tahun 1950 sampai saat ini – 31 dari 37 negara di dunia yang selalu berada di level low income countries berasal dari Afrika Sub Sahara –, adalah kondisi sosial – politiknya yang terus tidak stabil.

Selain ketidakstabilan politik, negara-negara yang terjebak dalam middle-income trap umumnya menghadapi dua tantangan politik dan institusional. Pertama, kebijakan-kebijakan yang

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas – dalam hal ini inovasi dan human capital – membutuhkan investasi yang sangat besar dalam kapasitas institusional. Kedua, tantangan-tantangan institusional ini datang ketika kapasitas politik untuk membangun institusi-institusi ini sedang dalam keadaan lemah, dikarenakan oleh fragmentasi dalam koalisi politik yang seharusnya berpotensi sebagai pendukung. Aktivitas politik menjadi terhambat juga oleh adanya perpecahan dalam kelompok-kelompok sosial, khususnya antara perusahaan dan tenaga kerja, dan umumnya oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (Doner 2016).

Dalam menganalisis keadaan ekonomi sebuah Negara, masalah yang tampak tidak selalu hitam atau putih, tidak sepenuhnya aspek ekonomi atau sepenuhnya aspek non-ekonomi, seringkali masalah ekonomi begitu kompleks dimana kedua aspek tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi. Kasus middle-income trap di Malaysia juga dapat dianalisis dengan mempertimbangkan kaitan aspek-aspek ekonomi dan non-ekonomi di atas. Di samping ekspor manufaktur yang cukup besar, Malaysia belum mampu benar-benar independen dari komoditi resource-based². Hal ini ditunjukkan dengan proporsi ekspor Malaysia dari tahun ke tahun, pada tahun 1995, dari 10 ekspor terbesar Malaysia, 7 di antaranya merupakan komoditi resource-based dan tidak satupun yang merupakan produk dalam kategori high-tech. Lima tahun kemudian, terdapat 5 item resource-based dan 3 item kategori high-tech. Di tahun 2006, dalam 10 besar komoditi ekspor Malaysia, produk-produk resource-based masih mengambil 5 tempat dari keseluruhan, sedangkan hanya ada satu produk high-tech yang termasuk di dalamnya, dengan sisanya ditempati oleh produk kategori medium-tech. Secara keseluruhan, data komoditi

² Komoditas yang merupakan hasil produksi dari sumber daya alam.

ekspor Malaysia tersebut memberikan impresi bahwa keuntungan komparatif Malaysia masih berada pada produk-produk resource-based, terutama kayu dan minyak kelapa sawit (Yusuf et. al. 2009).

Salah satu kebijakan kontroversial yang dijalankan oleh Malaysia ialah New Economic Policy (NEP). Kontroversial karena NEP juga secara eksplisit menekankan pembentukan kelas Bisnis Bumiputera, yang kemudian diinterpretasikan dalam beragam cara oleh banyak pihak, salah satunya menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap etnis-etnis lain di Malaysia. Pengamat politik dari Rajatnam School of International Studies, Nanyang University di Singapura, Farish Ahmad-Noor tidak membantah bahwa kebijakan NEP memang membawa perubahan dalam masyarakat Malaysia dan penguasaan ekonomi Malaysia. Namun ia mengungkapkan pula bahwa implementasi NEP selama 30 tahun lebih memunculkan kecenderungan kronisme dalam ekonomi politik Malaysia. Menurutnya kebijakan ini telah disalahgunakan oleh pihak pemimpin dan kroni-kroni pemerintah sendiri (BBC Indonesia 2010). Edmund Terrence Gomez menambahkan argumen tersebut dengan menjelaskan bahwa secara umum NEP memang menekankan praktek intervensi pemerintah dalam membangun ekonomi Malaysia. Dalam implementasinya, pemerintah Malaysia akhirnya tidak dapat menghindari tumbuhnya sistem patronase dalam perekonomian Malaysia.

NEP memiliki dua objektif, pertama, yaitu untuk menghapuskan kemiskinan rakyat Malaysia dan kedua, melakukan restrukturisasi masyarakat Malaysia untuk mengurangi tradisi identifikasi ras dengan fungsi ekonomi. Kedua tujuan itu direalisasikan lewat ekspansi ekonomi yang besar-besaran. NEP diaplikasikan kedalam dua bentuk kebijakan, yaitu: (1) bantuan terhadap etnis Melayu (Bumiputera) dan, (2) perencanaan pembangunan regional. Kebijakan

pertama diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan formal tertulis dan institusi yang dirancang guna membantu Bumiputera untuk berpartisipasi dalam sektor perkotaan, khususnya industri, perdagangan dan keuangan, termasuk juga kepemilikan dan manajemen perusahaannya. Melalui NEP, konsep pembangunan regional pun berganti arah, tidak lagi sekedar masalah kontribusi untuk peningkatan pendapatan nasional pada primer, tapi lebih kepada upaya mengurangi disparitas regional antar etnis dan meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan etnis Melayu (Hansen et. al. 1990).

Tujuan-tujuan NEP menyebabkan intervensi pemerintah menjadi tidak terhindarkan. Pengaturan di sektor pertanian dan jasa terutama pada bidang perkebunan dan perbankan menjadi semakin kuat. Kelompok Bumiputera mulai beroperasi dan menguasai sektor-sektor tersebut, menggantikan modal asing yang selama ini memegang peranan. Pada awal tahun 1980an Malaysia menerapkan kebijakan Look East Policy, yang merupakan program industrialisasi dengan fokus pada industri berat dan elektronik. Disebut Look East Policy karena kebijakan ini berkaca pada program industrialisasi yang dilakukan oleh Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dengan kontribusi dari Jepang tersebut, pemerintah Malaysia meningkatkan aktivitas manufaktur dengan memulai proyek industri berat dan membentuk perencanaan industri lintas sektor guna memperluas pertumbuhan industri. Upaya-upaya tersebut diikuti dengan rencana penempatan pengusaha-pengusaha Bumiputera dalam bisnis baru yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1981 pemerintah Malaysia membentuk Heavy Industries Corporation of Malaysia yang nantinya meningkatkan investasi Negara dalam industri berat seperti semen, baja, mobil motor, dan proyek-proyek pembuatan jalan. Lewat HICOM, industri barang-

barang oleh Bumiputera mulai dikembangkan dengan dukungan kuat dari pemerintah. Dukungan-dukkungan yang diberikan pemerintah melingkupi subsidi, proteksi terhadap produk asing, pengendalian persaingan dalam pasar domestik, serta ikut campur secara langsung dalam kontrol usaha. Perusahaan-perusahaan besar seperti Kedah Cement, Perwaja, dan Proton merupakan contoh dari perusahaan yang pembentukannya dibawah oleh HICOM, dan perusahaan-perusahaan tersebut secara khusus dibentuk sebagai wadah pelatihan bagi tenaga kerja Bumiputera.

Pada kasus Malaysia daya tawar ekonomi dan politik didapatkan melalui hak yang telah diberikan secara konstitusional kepada kelompok bangsa Melayu. Hak tersebut diatur dalam Konstitusi mereka pada Artikel 153, yang secara garis besar mengatur kuota dalam mendapatkan fasilitas publik dan kesempatan kerja, dengan memberikan keistimewaan lebih terhadap kelompok bangsa Melayu³. Dalam perekonomian Malaysia, pengaturan tersebut mengakibatkan terjadinya kronisme (pelaku bisnis dan politisi berkolaborasi dalam aktifitas rent-seeking). Hal ini telah mengakibatkan terpusatnya kesempatan ekonomi pada segelitir kelompok yang dapat dengan mudah menetapkan harga barang dan jasa sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tersebut. Regulasi dan eksekusi regulasi menjadi tak terlaksana secara efektif dan tepat sasaran karena kronisme yang mempengaruhi aktivitas pengambilan kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik.

Ektremis Melayu hingga saat ini telah membela/mempertahankan hak Bumiputera dengan konsep Ketuanan Melayu – sering dikaitkan dengan gagasan kontrak sosial yang terbentuk antara Melayu dan non-Melayu – dimana orang Melayu dikatakan telah diberikan kewarganegaraan non-Melayu dalam

Federasi Malaya dengan ganti peningkatan hak untuk orang Melayu.

Sebagian penduduk Malaysia mengasosiasikan penyalahgunaan hak Bumiputera dengan partai dominan dalam koalisi yang berkuasa, United Malays National Organisation (UMNO). Kritik berpendapat bahwa kebijakan pro-Bumiputera telah berevolusi dari mendukung kesejahteraan ekonomi orang Melayu yang sebelumnya berekonomi lemah menjadi semata-mata upaya menanamkan loyalitas politik terhadap koalisi yang berkuasa.

Berdasarkan indeks kroni-kapitalisme tahun 2016 yang disusun oleh The Economist dengan data dari Forbes dan IMF, Malaysia berada pada peringkat dua di dunia untuk Negara dengan kekayaan para bilyunernya berasal dari sektor-sektor kroni, menempati posisi pertama di antara Negara-negara Asia lainnya, dan hanya kalah dari Rusia. Sebagai peringkat pertama, kekayaan bilyuner Rusia terhitung 21,3% dari keseluruhan GDP, dan 18% di antaranya berasal dari sektor kroni. Sedangkan Malaysia, meskipun persentase kekayaan bilyunernya terhadap GDP jauh lebih rendah dari Rusia, yaitu 13,3%, namun kontribusi sektor kroni di dalamnya mencapai 13%. Sehingga berdasarkan persentase sektor kroni terhadap kekayaan bilyuner di kedua negara, dapat dipastikan Malaysia menempati posisi lebih tinggi, yaitu 97,7%, dibandingkan dengan Rusia sebesar 84,5%.

Peningkatan intervensi negara yang diperlukan untuk pelaksanaan NEP telah membuka pintu untuk keterlibatan politik yang lebih besar dalam pembiayaan perusahaan di Malaysia. Karena pemerintah telah lebih aktif memberikan bantuan kepada perusahaan, pengusaha semakin menggunakan koneksi pribadi untuk mempengaruhi alokasi bantuan tersebut. Mempromosikan supermasi etnis Melayu tidak hanya merusak

³ dengan memberikan keistimewaan lebih terhadap kelompok bangsa Melayu

akuntabilitas pemerintah, tapi juga membuat ekonomi tidak sehat. Hal ini dapat dilihat pada kasus Proton, proyek mobil nasional yang dimulai sejak 1983. Selama bertahun-tahun, berbagai tariff dan nontariff barriers diterapkan pada mobil-mobil asing untuk menjaga harga mobil buatan Malaysia tersebut tetap murah secara komparatif. Namun Proton memiliki kualitas yang rendah dan belum mencapai skala ekonomi. Negara harus terus memberikan subsidi dan berbagai kebijakan proteksi, dan konsumen harus rela menerima kualitas Proton yang minim, karena harga mobil asing yang terlampau tinggi.

Banyak penduduk non-Bumiputera percaya bahwa mereka telah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di bawah ketentuan 'hak istimewa'. Ada kuota Bumiputera untuk kursus Matrikulasi Pemerintah, beasiswa, tempat di perguruan tinggi negeri, kepemilikan perusahaan publik yang terdaftar, reksa dana pemerintah dll. Non-Bumiputera menyatakan bahwa ketentuan ini tidak adil, terutama dalam hal pendidikan, dimana non-Bumiputera dengan skor tes yang tinggi tidak berhasil masuk, sedangkan Bumiputera dengan nilai tes yang lebih rendah dapat masuk universitas, beasiswa dll (The BBC 2016).

Warga Malaysia mendapatkan dorongan untuk melakukan emigrasi tidak hanya murni faktor ekonomi, meskipun faktor ekonomi seperti prospek karir masih menjadi motivasi utama. Ketidakadilan sosial terbukti menjadi faktor pertimbangan penting warga Malaysia untuk melakukan migrasi. Ketidakadilan sosial ini berbicara mengenai kebijakan Bumiputera yang selama ini memberikan pembatas tak kasat mata antara warga etnis Melayu dan etnis lain seperti Cina dan India, dan melahirkan persepsi di kalangan penduduk non-Bumiputera bahwa mereka merupakan warga kelas dua, di bawah penduduk Bumiputera. Faktor prospek kerja sebagai pendorong emigrasi sebenarnya juga sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan Bumiputera ini. Dengan pengadaan kuota etnis terhadap

insititusi pemerintah dan perlakuan yang berbeda dalam menjalankan bisnis berdasarkan etnisitas, para calon tenaga kerja non-Bumiputera tentunya memiliki kekhawatiran dalam menjalani dunia kerja di Malaysia. laporan oleh World Bank yang menyatakan bahwa etnis Cina merupakan penyumbang mayoritas dari brain drain di Malaysia (The World Bank 2016).

Brain drain –migrasi talent lintas batas– menyentuh inti dari aspirasi Malaysia untuk menjadi negara high-income. Human capital merupakan pondasi dasar dari ekonomi high-income. Pertumbuhan terus menerus dan bersifat skill-intensive membutuhkan kemajuan dan peningkatan talent atau human capital. Bagi Malaysia untuk dapat sukses dalam perjalanannya menuju negara high-income, ia butuh untuk mengembangkan, menarik kembali dan memelihara talent yang dimilikinya. Fenomena brain drain di sini nampaknya tidak selaras dengan objektif yang perlu dicapai Malaysia. Malaysia sedang membutuhkan talent bagi pembangunannya, namun talent yang dibutuhkan justru pergi meninggalkan Malaysia.

Kebijakan-kebijakan seperti penarikan kembali diaspora melalui berbagai insentif tidak cukup untuk mengatasi problem brain drain ini. Sistem dengan berdasarkan kepada merit atau prestasi harus diimplementasikan dengan sepenuhnya. Individu-individu dengan kompetensi tinggi, secara alamiah, mencari sistem meristokrasi yang mewujudkan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap orang untuk mencapai sukses dengan kapabilitas mereka masing-masing, dan sama sekali tidak memandang gender, seksualitas, usia, ras, atau perbedaan kelas. Meristokrasi akan mengizinkan warga berbakat Malaysia untuk mencapai sukses berdasarkan prestasi masing-masing dan hal ini akan membantu mengatasi persepsi akan adanya ketidakadilan sosial, yang menjadi alasan pendorong kedua bagi emigrasi tenaga kerja high-skilled Malaysia. Mengimplementasikan

sistem berdasarkan merit juga akan menghapuskan kebutuhan untuk mengandalkan koneksi dan korupsi, serta akan menumbuhkan kompetisi yang sehat dalam dunia bisnis.

Kebijakan industrial dan intervensi selektif pemerintah dilaksanakan dengan kualitas yang buruk dan kurang efektif pada Malaysia, dan sebagai gantinya ada terlalu banyak bentuk intervensi pemerintah yang dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan lain yang berlawanan dengan pembangunan. Intervensi-intervensi tersebut –yang kini disebut sebagai bukti dari kroni kapitalisme– menanggung sebagian tanggung jawab untuk kondisi rentan Malaysia yang mengantarkan pada krisis tahun 1997. Lebih penting lagi, kepentingan-kepentingan kroni tersebut telah mempengaruhi respon kebijakan pemerintah yang berujung pada memperburuk krisis. Dengan kata lain, meskipun kroni kapitalisme tidak secara langsung dapat menjelaskan asal muasal krisis, di samping sebelumnya kepentingan finansial kroni bertanggungjawab untuk kebijakan finansial pada pertengahan dekade 1990 yang berujung pada krisis, keberadaannya secara pasti memperburuk krisis di Malaysia. Berbagai bias kebijakan yang menguntungkan kroni-kroni yang berpengaruh politik ini juga merusak upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri paska krisis, yang dinilai krusial untuk pemulihan ekonomi (Sikorski 1997).

Praktik kontrol kapital di Malaysia oleh Perdana Menteri Mahathir dipahami oleh para pengamat sebagai sarana untuk membantu perusahaan-perusahaan kroni, seperti yang diungkapkan oleh K.S. Jomo:

The window of opportunity offered by capital controls has been abused by certain powerfully-connected business interests, not only to secure publicly funded bail-outs at public expense, but even to consolidate and extend their

corporate domination, especially in the crucial finance financial sector. Capital controls have been part of a package focused on saving friends of the regime, usually at the public's expense. (Jomo 2001)

Bukti anekdotal menunjukkan bahwa krisis juga mengancam perusahaan yang memiliki hubungan politik dan percaya bahwa kebijakan kontrol kapital merupakan kesempatan bagi politisi untuk mendukung beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dengan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol modal menciptakan ruang untuk kronisme. Informasi yang ada juga menunjukkan bahwa dugaan ini kemudian telah terbukti – misalnya melalui beberapa laporan oleh pers yang menunjukkan adanya dukungan pemerintah kepada beberapa perusahaan yang terhubung dengan pejabat penting pemerintah setelah September 1998. Perusahaan dengan hubungan politis memperoleh return saham yang lebih buruk pada fase awal dari krisis keuangan Asia, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki konsekuensi menjadi lebih berhutang saat terkena krisis. Namun saat kontrol kapital diterapkan, perusahaan-perusahaan ini rata-rata menjadi lebih baik.

Dalam kasus Malaysia, faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi didominasi oleh aspek non-ekonomi dalam level pembentukan kebijakan ekonomi dan politik. Aspek non-ekonomi yang memiliki peran besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan politik adalah Kebijakan Bumiputera, yang secara konstitusional memberikan jaminan bagi etnis Melayu dan pribumi Malaysia (disebut kelompok bumiputera), untuk mendapatkan keistimewaan dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari pendidikan – yang menyediakan kuota Bumiputera untuk kursus Matrikulasi Pemerintah, beasiswa, dan kursi di perguruan tinggi negeri-, kemudian ekonomi –dengan adanya pengaturan kepemilikan

perusahaan oleh Bumiputera, reksa dana pemerintah, kemudahan dalam pengajuan kredit usaha maupun perumahan dll., serta politik, dimana secara terang-terangan penguasaan ranah politik dipegang oleh UMNO yang merupakan partai dengan semangat supremasi etnis Melayu dan secara konsisten mengupayakan pemenuhan hak-hak istimewa rakyat Melayu, termasuk dengan mempertahankan kursi kepemimpinan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membeli loyalitas konstituen dengan menjual kesempatan-kesempatan strategis dalam bisnis di Malaysia kepada kelompok-kelompok kroni. Kelompok-kelompok kroni di Malaysia tersebut tumbuh akibat praktik rent-seeking yang merupakan akibat dari preferential treatment berdasarkan etnis di Malaysia.

Di negara kaya sumber daya alam seperti Malaysia, mudah sekali memanfaatkan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya alam kepada konstituen favoritnya dibandingkan dengan mengupayakan kebijakan ekonomi yang berorientasikan pembangunan. Arus uang yang begitu besar dari sumber daya alam membantu korupsi politik berkembang. Penguasaan sumber daya oleh kroni kemudian memberikan kekayaan dan kenyamanan yang sulit untuk dikorbankan. Pemerintah kurang merasakan urgensi membangun infrastruktur institusional untuk mengatur dan membebaskan pajak bagi ekonomi produktif di luar sektor sumber daya alam, sehingga ekonomi nasional lambat mengalami kemajuan. Penulis menduga bahwa terjebaknya Malaysia dalam kondisi middle-income trap, dapat disebabkan oleh satu faktor khusus yaitu, adanya kebijakan Bumiputera, mendorong tumbuhnya budaya kronisme dalam politik dan ekonomi Malaysia yang implikasinya kemudian membatasi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Kebijakan bumiputera yang berdasarkan onsep Ketuanan Melayu – sering dikaitkan dengan gagasan kontrak

sosial yang terbentuk antara Melayu dan non-Melayu – dimana orang Melayu dikatakan telah diberikan kewarganegaraan non-Melayu dalam Federasi Malaya dengan ganti peningkatan hak untuk orang Melayu, secara serius menimbulkan persepsi ketidakadilan dan perasaan ketidakpuasan oleh etnis selain Melayu. Perlakuan dengan dasar kebijakan Bumiputera menunjukkan bahwa etnis-etnis non-Melayu dan pribumi merupakan rakyat kelas dua di Malaysia. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan pendorong bagi etnis-etnis tersebut untuk meninggalkan Malaysia, karena merasa kurang diapresiasi berdasarkan eksistensi dan prestasi individual. Selain itu kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tersier, pekerjaan di pemerintahan, dan menjalankan bisnis secara mandiri, juga cukup terbatas.

Maraknya migrasi warga Malaysia menimbulkan sebuah kekhawatiran akan terjadinya, atau bahkan telah terjadinya fenomena brain drain yang kerap ditemui akibat praktik migrasi. Brain drain mengacu aspek negatif dari kemudahan akses mobilitas atau migrasi di era globalisasi ini. Dari sisi negara miskin atau berkembang, kemudahan akses mobilitas penduduk ini tentu kemudian menarik para sarjana atau skilled people untuk kemudian memperbaiki nasibnya dengan pindah dan bekerja di negara-negara maju dan juga para calon pelajar untuk ikut melanjutkan studi di negara-negara tersebut.

Disiplin pasar, transparansi, dan good governance Malaysia memburuk demi mempertahankan supremasi etnis Melayu. Namun hingga lebih dari 4 dekade perlakuan istimewa ini, masih begitu banyak bisnis Bumiputera yang tidak kompetitif dan harus bergantung pada pemerintah untuk dapat bertahan, etnis non-Melayu berbondong-bondong meninggalkan Malaysia, yang mana hal ini dapat merusak prospek ekonomi jangka panjang. Meskipun tingkat pendidikan etnis Melayu telah cukup

meningkat, rata – rata pendapatan rumah tangga mereka masih berada di bawah kelompok etnis lainnya. Pemerintah Malaysia perlu untuk segera melakukan kebijakan yang mengurangi sentimen etnisitas dalam komunitas Malaysia. Adanya preferential treatment sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik di Malaysia. Melanjutkan kebijakan yang diskriminatif tersebut dapat memperlambat upaya – upaya pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan tidak menutup

kemungkinan akan berujung pada social unrest seperti yang terjadi pada negara – negara yang kental dengan diskriminasi etnis di Timur Tengah. Ketidakpuasan rakyat Malaysia tidak hanya berakar dari preferential treatment, namun juga bagaimana kebijakan diskriminatif tersebut disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan politik. Sehingga reformasi terhadap institusi pemerintahan menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan, untuk mengangkat moral dan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap otoritas.

Daftar Pustaka

- Artikel Daring
- [1] BBC Indonesia, 2010 “Siapa yang untung dalam politik Bumiputera?”. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/04/100402_malysiacronies.shtml. Diakses pada 15 Desember 2016. [daring]
 - [2] Badawi, Abdullah Ahmad, 2004. “Moving Forward — Towards Excellence”. Dalam Wayback Machine. Diakses pada 16 Desember 2016 [daring]
 - [3] Bennet, Abang, 2005. “UMNO: A Threat to National Prosperity”. Dalam <http://aliran.com/archives/monthly/2005b/7d.html>. Diakses pada 15 Desember 2016 [daring]
 - [4] HV, Vinayak “Understanding ASEAN: Seven Things You Need to Know | McKinsey & Company,” Dalam <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know>. Diakses pada 27 Maret 2016 [daring].
 - [5] Malaysiakini, 2016. “Should the gov’t bail out Proton, again?” Dalam <http://www.malaysiakini.com/letters/300566> Diakses pada 18 Desember 2016 [daring]
 - [6] Malaysia Today, 2016. “Malaysia’s National Car Driving Into A Dead End? Not Many Options Left For Proton” Dalam <http://www.malaysia-today.net/malaysias-national-car-driving-into-a-dead-end-not-many-options-left-for-proton/>. Diakses pada 18 Desember 2016 [daring]
 - [7] McKinsey & Company, n.d. “Understanding ASEAN: Seven Things You Need to Know”. Dalam <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know> Diakses pada 27 Maret 2016 [daring]
 - [8] Ooi, Jeff, 2005. “The 30% solution” dalam Wayback Machine. Diakses pada 16 Desember 2016 [daring]
 - [9] Photius, Coutsoukis, 2016. “Malaysia Geography 2000”, CIA World Factbook 2001. <http://www.photius.com/wfb200/malaysia/malaysia-geography.htm>. Diakses pada 8 Desember 2016. [daring]
 - [10] PPSDM Geologi, Mineral, dan Batubara, n.d. “Fenomena Resources Curse” Web. <http://www.pusdiklat-minerba.esdm.go.id/index.php/kerjasama/item/301-fenomena-resources-curse>. Diakses pada 15 Desember 2016 [daring]
 - [11] Schuman, Michael, 2010. “Escaping the Middle-Income Trap” Time Business, 10 Agustus 2010. Dalam <http://business.time.com/2010/08/10/escaping-the-middle-income-trap/>. Diakses pada 27 Maret 2016. [daring]
 - [12] Security Commission Malaysia, 2016. “Bumiputera Equity Requirements For Public Listed Companies”. Dalam <http://www.sc.com.my/bumiputera-equity-requirements-for-public-listed-companies/>. Diakses pada 17 Desember 2016 [daring]
 - [13] Shari, Michael, 2002. Mahathir's Change of Heart? “Business Week” dalam Wayback Machine. Diakses pada 16 Desember 2016 [daring]
 - [14] The BBC, 2013. “Is Malaysia University Entry a Level Playing Field?” BBC News. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-23841888>. Diakses pada 10 Desember 2016 [daring]
 - [15] _____, 2013. “Will Malaysia’s Brain Drain Block Its Economic Ambitions? - BBC News.” Dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-22610210>. Diakses pada 10 Desember 2016 [daring]
 - [16] The New York Times, 2016. “The Cost of Malays Supremacy”. Dalam http://www.nytimes.com/2015/08/28/opinion/the-costs-of-malay-supremacy.html?_r=1. Diakses pada 16 Desember 2016 [daring]
 - [17] The World Bank, 2016. “Country and Lending Groups.” Dalam <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country->

- and-lending-groups. Diakses pada 28 Maret 2016. [daring]
- [18] Top University, 2016, "QS World University Rankings® 2015/16. N.p., 11 Sept. 2015". Dalam.
<http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region+=country+=faculty+=stars=false+search=>. Diakses pada 28 Maret 2016. [daring]
- [19] Trading Economics, 2016. "Singapore Average Monthly Wages | 1989-2016 | Data | Chart | Calendar." Dalam
<http://www.tradingeconomics.com/singapore/wages>. Diakses pada 28 Maret 2016. [daring]
- [20] The Economist, 2016. "Our Crony Capitalism Index: The Party Winds Down". Dalam
<http://www.economist.com/news/international/21698239-across-world-politically-connected-tycoons-are-feeling-squeeze-party-winds>. Diakses pada 14 Desember 2016 [daring]
- [21] Yeap, Cindy 2015. "The State of the Nation: Has Malaysia escaped the middle-income trap?" Dalam
<http://www.theedgemarkets.com/my/article/state-nation-has-malaysia-escaped-middle-income-trap> Diakses pada 27 Maret 2016 [daring]
- Buku
- [22] Freeland, Christya, 2012. "Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else." Penguin Press
- [23] Hansen, Niles, Benjamin Higgins, Donald J. Savoie, 1990. "Regional Policy in a Changing World." New York: Plenum Press.
- [24] Hoiberg, Dale H., ed., 2010. "Abdul Razak bin Hussein, Tun Haji". Encyclopedia Britannica. I: A-ak Bayes (15th ed.). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica Inc.
- [25] Laura, Roselle dan Sharon Spray, n.d. "Scholarly Literature and The Literature Review", Research and Writing in International Relations. New York: Pearson Longman.
- [26] Le Grain, Philippe., 2006. "Brain Drain or Brain Grain? The costs and Benefits of Skilled Emigration, dalam Immigrants Your Country Needs Them." London: Little Brown, hal 179-197.
- [27] Means, Gordon P., 1991. "Malaysian Politics: The Second Generation". Oxford University Press.
- [28] Paus, Eva, 2011. "Latin America's Middle Income Trap. In Americas Quarterly 5"
- [29] Putra, Tunku Abdul Rahman, 1986. Political Awakening. Pelanduk Publications
- [30] Rodan, Garry, Kevin Hewison, and Richard Robison, 1997. "The Political Economy of South – East Asia: An Introduction". New York: Oxford University Press.
- [31] Ulber Silalahi, n.d. "Metode Penelitian Sosial". Bandung: Unpar Press.
- [32] Jurnal
- [33] Agénor, Pierre-Richard, Otaviano Canuto, and Michael Jelenic, 2012. "Avoiding Middle-Income Growth Traps". Dalam
<http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP98.pdf> [pdf]
- [34] Booth, Anne. 1999. "Initial Conditions and Miraculous Growth: Why Is South East Asia Different from Taiwan and South Korea?" World Development 27
- [35] Cherif, Reda, & Hasanov, Fuad, 2015. "The Leap of the Tiger: How Malaysia Can Escape the Middle-Income Trap". IMF Working Paper WP/15/131; June 2015
- [36] Coff, Russel W., 1997. "Human Assets and Management Dilemmas: Coping with Hazards on the Road to Resource-Based Theory". The Academy of Management Review Vol. 22, No. 2 (Apr., 1997), pp. 374-402
- [37] Doner, R. F., & Schneider, B. R., 2016. "The Middle-Income Trap: More Politics than Economics". World Politics, 68(4), 608–644. doi:10.1017/S0043887116000095 Dalam <http://web.mit.edu/polisci/people/faculty/documents/SchneiderandDoner2016.pdf> [pdf]
- [38] Eichengreen, Barry, 2011. "Escaping The Middle-Income Trap," Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, pages 409-419.
- [39] _____, 2012. "When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China" NBER Working Paper No. 16919. Dalam
<http://www.nber.org/papers/w16919.pdf> [pdf]
- [40] Felipe, Jesus, Arnelyn Abdon, and Utsav Kumar, 2012. "Tracking the Middle-Income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why?" SSRN Electronic Journal SSRN Journal
- [41] Foley, J.A. et. al., 2011. "Solutions for a Cultivated Planet." Nature 478: 337–42.
- [42] Gatsiounis, Ioannis, 2004. "Abdullah stirs a hornets' nest". Asia Times.
- [43] Gelb, Alan, et. al., 1988. "Oil Windfalls – Blessing or Curse?" dalam
<http://documents.worldbank.org/curated/en/36401468771314677/Oil-windfalls-Blessing-or-curse> [pdf]
- [44] Gomez, Edmund Terence, 2009. "The Rise and Fall of Capital: Corporate Malaysia in Historical Perspective." Journal of Contemporary Asia 39, no. 3 (August 2009): 345–381. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472330902944404>. [pdf]
- [45] Indermit Gill dan Homi Kharas, 2007. "An Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth". Dalam
http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EA_Renaissance_full.pdf [pdf]
- [46] Johnson, Simon dan Todd Mitton, 2001. "Cronyism And Capital Controls: Evidence From Malaysia" NBER Working Paper Series

- [47] Jomo, K. S., 1998. "Malaysian Debacle: Whose Fault?" *Cambridge Journal of Economics* 22, no. 6 (November 1, 1998): 707–722. Dalam <http://cje.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/cje/22.6.707>. Diakses pada 29 Desember 2016 [pdf]
- [48] Kahn, Joel S., 1998. "Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand." *Institute of Southeast Asian Studies*, Singapore.
- [49] Kaplan, Ethan, and Dani Rodrik, 2001. "Did The Malaysian Capital Control Work?" NBER Working Paper Series.
- [50] Kharas, Homi dan Kholi, Harinder, 2011. "What Is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How Can It Be Avoided"
- [51] Lim, Kim-Hwa, Ratha Krishnan Krishnan, and Jo-yee Yap., 2014. "The Economic Costs and Gains of Brain Drain : The Case of Malaysia and Its Policy Relevance," no. July (2014): 1–49. http://penanginstitute.org/v3/files/BrainDrain_20140713.pdf. [pdf]
- [52] Masuyama, Seiichi, Dona Vandenbrink and Chia Siow Yue, 1997. "Industrial Policies in East Asia." *Nomura Research Institute (NRI) and Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Japan and Singapore*
- [53] Rajan, Raghuram G., dan Luigi Zingales, 1998. "Which Capitalism? Lessons from the East Asian Crisis," *Journal of Applied Corporate Finance* 11
- [54] Ramstetter, Eric D., 1990. "Policy Options for the Singapore Economy by Lim Chong Yah and Associates." *Asian Economic Journal* 4, no. 1 (March 1990): 170–174. <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-8381.1990.tb00154.x>. Diakses pada 27 Desember 2016 [pdf]
- [55] Rodrik, Dani, 1995. "Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich." *Economic Policy* 20
- [56] Rudengren, Jan, Lars Rylander, and Claudia Rives Casanova, 2014. "It's Democracy, Stupid: Reappraising the Middle-Income Trap". *Stockholm Paper* 2014.
- [57] Sachs, Jeffrey D. and Andrew Warner, 2001. "The Curse of Natural Resources" *European Economic Review*, 2001, vol. 45, issue 4-6, pages 827-838
- [58] Sikorski, Douglas. 1997. "Southeast Asia Southeast Asia's Misunderstood Miracle: Industrial Policy and Economic Development in Thailand, Malaysia and Indonesia." By K.S. Jomo et Al. Boulder: Westview Press, 1997. Pp. Xiv, 196. Glossary, Tables, Chart, Bibliography, Index." *Journal of Southeast Asian Studies* 29, no. 2 (September 24, 1998): 398.
- [59] *The Economist*, November 26, 1977 "The Dutch Disease" p. 82-83.
- [60] The World Bank, 2012. "China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society".
- [61] The World Bank, 2011. "Malaysia Economic Monitor: Brain drain.". Dalam <http://documents.worldbank.org/curated/en/282391468050059744/Malaysia-economic-monitor-brain-drain> [pdf]
- [62] Vivarelli, Marco, 2014. "Structural Change and Innovation as Exit Strategies from the Middle Income Trap," *IZA Discussion Papers* 8148, *Institute for the Study of Labor (IZA)*.
- [63] Yusuf, Shahid & Kaoru Nabeshima, 2009. "Tiger Economies Under Threat: A Comparative Analysis of Malaysia's Industrial Prospects and Policy Options". *World Bank*.